

**KEWENANGAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SAIKHO AS'ALI**  
**NBI : 311201200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**KEWENANGAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**SAIKHO AS'ALI  
NBI : 311201200**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Slamet Suhartono, SH. MH  
NPP/NIP : 20310860065**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**KEWENANGAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM**

Oleh :

**SAIKHO AS'ALI**

**NBI : 311201200**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 29 Januari 2016**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 516/SK/FH/IX/2015**

**Tanggal : 14 September 2015**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Sumiyati, SH., M.M., M.H. .....**  
**NPP : 20310850031**

**Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310870119**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum**

**NPP : 20310880147**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Ayahanda As'ali dan Ibunda Sahmina yang selama ini telah sabar dalam mendidik dan menyayangiku. Semoga Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku semenjak kecil hingga sekarang.

Kakak saya Saiful Bahri yang selalu memberikanku keceriaan dan kasih sayang.

Teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan semangat dan bantuan selama ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program S-1 di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini ialah "Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam".

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Sugeng Hadi Purnomo, SH., M.H, selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Syofyan Hadi, SH., M.H, selaku Kepala Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Dr. Fajar Sugianto, SH., MH, selaku Ketua Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Wiwik Afifah, SPi, SH., MH, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Kasdi, S.Sos, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Sunarsih, S.Si., selaku Kasubag. Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10. Suwasono Adi, SE, MM., selaku Kasubag. Umum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Dosen Pembimbing Dr. Slamet Suhartono, SH. MH telah memberikan banyak waktu dalam dalam memberikan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
12. Sad PraptantoWibowo,SH. Selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Yang teristimewa Ayahanda tercinta As'ali dan Ibunda tercinta Sahmina yang selama ini selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta moril dan materil kepada penulis.
15. Kakak penulis Saiful Bahri yang telah memberikan dukungan dan doa serta keponakan penulis Dhani dan Safiq yang lucu-lucu yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Tunangan penulis Rofika yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan menghibur hati penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis semangat dalam penulisan skripsi ini.
17. Sahabat khususnya Jufri, Wafi, Hasib, Ainul Furqon, Jazuli, Ja'far Asshodiq, Arif Sudariyanto, Muhammad Arif, Julio dan Said Rahman yang telah memberi motivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya preode 2014-2015 yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi isi maupun tata bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk melengkapi skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 10 Januari 2016

Penulis,

Saikho As'ali

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam yang hingga saat ini Pengadilan Agama masih menerbitkan Akta Perceraian tersebut dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan dengan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerbitkan Akta Perceraian tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor kewenangan Peradilan Agama yang hanya terbatas pada hal “memeriksa, mengadili, dan memutus perkara” dan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang memberikan ketentuan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan Undang-Undang yang semestinya mengatur tentang hal yang berkaitan dengan ketentuan perkara perdata tertentu, sementara UU No. 23 Tahun 2006 merupakan UU yang lebih khusus mengatur tentang Administrasi Kependudukan, termasuk Akta Perceraian, dan Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian adalah berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan seperti yang terurai secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang diperoleh secara mandat dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Bupati/Wali Kota.

Kata Kunci : Kewenangan, Akta Perceraian



## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the Authority Issuance of Certificate of Divorce For The Islamic Religion , which until now religious court still publish Deed Divorce is on the basis of Article 84 paragraph (4) of Law No. 7 of 1989 that about the Religious and the Department of Population and Civil Registration as Agencies Executing the Population Administration by virtue of Article 40 of Law No 23 of 2006 that about Population Administration. The findings obtained from this research is the authority of the religious court in issuing the Divorce Act does not comply with legislation. It is caused by several factors ranging from the factor authority of religious court which are limited to "examine, hear and decide the case" and the principle of Lex specialis derogat legi generali which gives the provisions of that Act that are special (lex specialis) override general laws (lex generalis) which in this case is Law No. 7 of 1989 which is the law that should regulate matters relating to the provision of certain civil cases, while Law No. 23 of 2006 is a more specific law that about Adimistrasion Population, including the Divorce Act, and the Divorce Act Peneribitan Authority that located in the Department of Population and Civil Registration. It is based on the authority of the Department of Population and Civil Registration as an Implementing Agency of the Population Administration are outlined clearly and firmly in Law No 23 of 2006 concerning Population Administration with the authority that be obtained a mandate from the Government of Regency / City which in this case is the regent /Mayor.*

**Keywords :** *Authority, Certificate of Divorce*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	13
3. Tujuan Penelitian .....	14
4. Manfaat Penelitian .....	14
a. Manfaat Teoritis .....	14
b. Manfaat Praktis .....	14
5. Metode Penelitian .....	14
a. Jenis Penelitian .....	14
b. Metode Pendekatan .....	15
c. Sumber Bahan Hukum .....	15
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19

1.....	Teori	
Kewenangan .....		19
a.....	Peng	
ertian Kewenangan .....		19
b.....	Sumb	
er dan Cara Memperoleh Kewenangan .....		20
2.....	Teori	
Pemisahan Kekuasaan .....		22
3.....	Peng	
ertian Peradilan Agama .....		27
4.....	Kedu	
dukan Pengadilan Agama .....		27
5.....	Asas-	
asas Umum Peradilan Agama .....		28
6.....	Kewe	
nangan Pengadilan Agama .....		31
a.....	Kewe	
nangan Relatif .....		31
b.....	Kewe	
nangan Absolut .....		32
7.....	Akta	

a.....	Akta	
Otentik .....		34
b.....	Akta	
di Bawah Tangan .....		35
8.....	Cerai	
.....		36
BAB III PEMBAHASAN .....		39
1. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penerbitan Akta Perceraian Bagi Yang Beragama Islam .....		39
a.....	Pemi	
sahan Kekuasaan di Indonesia .....		39
b.....	Hubu	
ngan Antarlembaga Negara .....		43
1) MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi .....		43
2) DPR dengan Presiden, DPD, dan MK .....		44
3) BPK dengan DPR dan BPD .....		46
4) Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.....		47
a).....	Fung	
si, Tugas, Hak, dan Wewenang DPR .....		48
b).....	Fung	
si Eksekutif.....		53

c).....	Fung	
si Yudisial.....		55
c.....	Kewe	
nangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam		
Penerbitan Akta Perceraian.....		60
1) Prosedur Penerbitan Akta Perceraian.....		60
2) Tindakan Pemerintah.....		63
3) Wewenang Pemerintah.....		68
4) Sumber Kewenangan.....		71
2. Keabsahan Pengadilan Agama Dalam Penerbitan Akta Perceraian....		75
a.....	Kewe	
nangan Pengadilan Agama.....		76
b.....	Kepu	
tusan Tata Usaha Negara.....		84
c.....	Asas-	
Asas Peraturan Perundang-undangan.....		89
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>95</b>
1.....	Kesi	
mpulan.....		95
2.....	Saran	96
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>97</b>